

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Apeldoorn, L.J. van. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 1967, *Legal Theory*, Columbia University Press, New York.
- HS, Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 1997, *Penelitian Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Haryadi, Dwi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, UBB Press, Bangka Belitung.
- Hayati, Tri, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Ika, Syahrir, 2017, *Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 1 Nomor 1: Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara*, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2020, *Buku Saku Data Strategis: Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jakarta.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2021, *Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020 – 2024*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi, 2008, *Ikhtisar Putusan MK 2003-2008*, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oktoberina, Sri Rahayu, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Soeroso, R. 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sukandarrumidi, 2016, *Bahan-bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan, Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2011, *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang Pertambangan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

**Tesis:**

Putra, Wirahardi, 2015, “Konsistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas Perubahan Pemegang Saham dan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Widagdo, Singgih, 2015, “*Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari Aspek Hukum Bisnis*”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**Jurnal:**

Humaira, Nabila Zulfa, Hendro Saptono, Budi Gutami, “Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kontrak Karya Pertambangan Antara Pemerintah Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia”, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Nalle, Victor Imanuel Williamson, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012.

Ridwan, Annisa Syaufika Yustisia, 2012, “Perubahan Rezim Kontrak Karya Menuju Izin Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009”, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 31 No 4.

Sigit, Sutarjo, “Perkembangan Pertambangan di Indonesia”, *Materi Kuliah Pelatihan Hukum Perpajakan di bidang Pertambangan dan Migas*, Yayasan Krida Caraka Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta, 1994.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1826 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu.